



PERSYARATAN SEKOLAH TATAP MUKA

Pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengatur pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung berdasarkan protokol kesehatan hanya bagi daerah berstatus zona hijau. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara bertahap dengan sejumlah ketentuan.

Persyaratan

- Sekolah berada di zona hijau.
- Izin pemerintah daerah atau Kanwil/Kantor Kemenag.
- Memenuhi daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.
- Ada persetujuan dari orang tua.

Ketentuan

- 1. Pakai masker kain, diganti setiap 4 jam.
- 2. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer.
- 3. Jaga jarak minimal 1,5 meter, tidak kontak fisik.
- 4. Tidak bergejala Covid-19 termasuk dengan orang serumah.
- 5. Pendidikan dasar dan menengah maksimal 18 peserta.
- 6. SLB maksimal lima peserta.
- 7. PAUD maksimal lima peserta dan jarak tiga meter.
- 8. Sistem pergiliran/ sif rombongan belajar.
- 9. Kegiatan olahraga/ ekstrakurikuler tetap jaga jarak dan dilarang menggunakan peralatan yang digunakan bersama-sama.

► PENDIDIKAN SEKOLAH

Wali Murid Ingin Pembelajaran Daring

*Bhekti Suryani, Catur Dwi Janati & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com*

JOGJA—Sebagian besar orang tua/wali murid di Kota Jogja tidak menginginkan anak mereka belajar tatap muka di sekolah, mengingat pandemi Covid-19 yang belum melandai.

Wakil Wali Kota sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi, menyatakan lembaganya melalui Dinas Pendidikan belum lama ini melakukan survei untuk mengetahui persepsi orang tua murid tentang belajar daring maupun tatap muka di sekolah.

Hasilnya sebanyak 54% memilih tidak menghendaki belajar tatap muka dalam kondisi seperti sekarang, sedangkan sebanyak 46% menghendaki belajar tatap muka di sekolah dibuka kembali.

"Masyarakat yang menghendaki belajar tatap muka merasa anak-anaknya di rumah tidak ada aktivitas dan lebih banyak persoalan sosial yang malah muncul di keluarga," kata Heroe Poerwadi, dalam jumpa pers, Rabu (22/7).

Mereka yang sebagian besar memilih belajar daring merasa khawatir dengan Covid-19 yang masih meluas. Selain itu, kata dia, hasil survei juga menemukan siswa SD negeri dan SMP swasta di Kota Jogja masih ada yang kesulitan mengakses pembelajaran daring. Antara lain karena keterbatasan akses Internet.

Meskipun Pemkot telah menyediakan layanan *Wifi* gratis di lebih dari 200 titik di Kota Jogja, tetapi menurutnya belum menjangkau semua wilayah. Pemkot Jogja kini tengah mempersiapkan program untuk mengatasi kesulitan belajar daring tersebut.

Sumber: Kemendikbud/Antara
Grafis: Harian Jogja/Titi Harjanto

► Halaman 10

Wali Murid...

"Yang akan kami coba adalah model guru berkunjung [ke rumah murid] di siswa SD dan SMP yang kesulitan akses," jelasnya.

Terkait dengan kebijakan membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah, Heroe menegaskan kebijakan itu akan dilakukan setelah mendapat persetujuan orang tua murid. Ketentuan itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. "Besok kalau misalnya mau tatap muka, maka sesuai aturan SKB 4 Menteri harus mendapat persetujuan dari orang tua," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Budi Asrori mengakui memang ada beberapa permasalahan dalam pembelajaran daring, antara lain kondisi orang tua atau masyarakat yang tidak semuanya dapat mengakses teknologi. Persoalan lain yang ditemui yakni materi pembelajaran. Tidak semua materi pembelajaran dapat diajarkan secara daring. "Misalnya untuk kelas 1 SD, materi kayak calistung (baca, tulis, hitung) itu kan sulit untuk didaringkan, kalau anak belum

bisa baca tulis hitung kan repot," ujarnya.

Dikenai Sanksi

Di Bantul, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) setempat memastikan sampai saat ini pembelajaran masih menerapkan sistem jarak jauh atau Belajar dari Rumah (BDR). Bahkan sekolah yang menerapkan tatap muka bisa dikenai sanksi.

Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko mengatakan sampai saat ini Bantul belum memungkinkan menerapkan pembelajaran dengan tatap muka. Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya sekolah yang berada di zona hijau yang boleh menerapkan pembelajaran tatap muka. "Di Bantul belum bisa tatap muka. Saat ini masih BDR murni 100 persen. Sistem ini baru saja selesai kami sosialisasikan," kata Isdarmoko.

Disdikpora sempat menerima masukan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas melalui pembatasan jumlah kuota siswa atau sistem

sif, tetapi usulan itu masih dalam pembahasan dan belum diterapkan di Bantul. Isdarmoko memastikan belum ada sekolah formal di Bantul yang melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Namun untuk sekolah informal, kata dia, ada beberapa yang menerapkan tatap muka terbatas seperti Tempat Penitipan Anak (TPA) dan sejenisnya. Ia tidak memungkiri ada keluhan sekolah swasta yang kesulitan menarik biaya sekolah ketika menerapkan pembelajaran jarak jauh.

"Kalau ada sekolah yang melanggar [mengelar pembelajaran tatap muka] mesti kami akan memberikan sanksi teguran mulai dari peringatan dan sanksi lain jika tidak diindahkan," kata Isdarmoko.

Kepala SMPN 2 Banguntapan, Purwanto mengatakan telah menerapkan sistem pembelajaran BDR dengan tiga metode tersebut. Khusus untuk metode manual Purwanto meminta siswa atau orang tua siswa mengambil tugas di sekolah dan mengembalikannya lagi ke sekolah. (Lajeng Padmaratri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005